

(Hibah Pascasarjana)
III/LPPM/2013-03/53-P

Laporan

Dampak KUPS terhadap kinerja UKM Peternak Sapi Studi Kasus di Lembang, Jawa Barat



Disusun Oleh:

Gandhi Pawitan, Ph.D. (11533)
R. Gerry Oktavia, S.Sos (2012851008)
Bryan Hilton, S.Sos. (2012851011)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Katolik Parahyangan
2013

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| DAFTAR ISI | 2 |
| ABSTRAK | 3 |
| BAB I. PENDAHULUAN | 4 |
| Tujuan penelitian | 6 |
| Identifikasi masalah | 6 |
| Keutamaan penelitian | 6 |
| Target keluaran..... | 7 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| Value Chain dan Actor Analysis | 9 |
| Ekonomi Kerakyatan..... | 10 |
| Efektivitas | 12 |
| Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) | 13 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | 16 |
| Jenis penelitian, populasi dan target populasi | 16 |
| Kerangka konseptual | 16 |
| Road map penelitian..... | 17 |
| Teknik pengambilan data | 18 |
| Analisis data..... | 19 |
| Cakupan | 19 |
| Keutamaan penelitian | 19 |
| Tahapan kerja | 20 |
| BAB IV. Hasil dan Pembahasan..... | 21 |
| Program KUPS..... | 21 |
| Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU)..... | 22 |
| Kendala yang dihadapi KPSBU | 23 |
| Kajian Tingkat Kebijakan..... | 25 |
| Kajian Tingkat Organisasi : KPSBU Lembang | 27 |
| Profil KPSBU dan RAT | 27 |
| Visi | 28 |
| Misi | 28 |
| Nilai-nilai..... | 28 |
| Sejarah | 28 |
| Pengurus..... | 30 |
| Pengawas..... | 30 |
| Manajemen KPSBU Lembang | 30 |
| Tanggapan atas KUPS | 31 |
| Posisi KUPS dibandingkan fasilitas KPSBU itu sendiri..... | 32 |
| Fasilitasi KPSBU terhadap anggota yang akan mengakses KUPS | 32 |
| Kajian Tingkat Operasional | 33 |
| Respon Peternak..... | 33 |
| Sosialisasi KUPS..... | 35 |
| DAFTAR PUSTAKA | 37 |

ABSTRAK

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UKM. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UKM salah satunya adalah peningkatan akses pada sumber pembiayaan. Salah satu sektor UKM adalah usaha pembibitan sapi yang menghasilkan daging dan susu sapi.

Untuk mewujudkan swasembada dalam pengadaan daging dan susu sapi, Kementerian Pertanian menerbitkan PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 40/Permentan/PD.400/9/2009, tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI. Kemudian dilanjutkan dengan keputusan Menteri Keuangan pada tahun yang sama yang menetapkan besarnya bunga pinjaman 5% untuk KUPS tersebut. Sebagai langkah implementasinya telah ditunjukkan juga sebanyak 11 bank pemerintah sebagai pelaksana, yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BPD Sumut, Bank BPD Sumbar, Bank BPD Jateng, Bank BPD DIY, Bank BPD Jatim, Bank BPD Bali, dan Bank BPD NTB.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap mengenai implementasi KUPS, serta dampak KUPS terhadap kinerja peternak sapi. Untuk itu dilakukan tahap eksplorasi penyaluran dan penggunaan KUPS di pelaku peternak sapi. Penyaluran KUPS akan menyangkut mekanisme dan prosedurnya, sedangkan penggunaan KUPS menyangkut aspek manfaat terhadap pengembangan usahanya.

Pemahaman yang lebih mendalam dilakukan melalui tahap eksplanatori, yaitu eksplorasi kriteria/faktor keberhasilan/kegagalan implementasi KUPS, penjelasan tentang pengaruh KUPS terhadap kinerja dan pengembangan usahanya.

Kajian ditingkat kebijakan. Program pengembangan perbibitan merupakan suatu hal yang harus segera ditangani oleh pemerintah dalam mendukung program PSDSK. Program reguler untuk mendukung PSDSK tahun 2014 melalui pengembangan usaha pembibitan yang telah difasilitasi oleh pemerintah antara lain program skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Aksi Perbibitan dan APBNP. Hal ini bertujuan untuk menjadikan kelompok peternak mandiri serta dapat memanfaatkan sumber pendanaan dan pelayanan dalam upaya peningkatan skala usaha, pengetahuan dan keterampilan teknologi pembibitan.

Kajian ditingkat organisasi. KPSBU Lembang (Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara), adalah koperasi primer tunggal usaha di kecamatan Lembang yang merupakan suatu wadah bagi para petani peternak sapi perah dengan wilayah kerja Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara. Program KUPS yang dibuat oleh pemerintah sebagai salah satu dukungan pemerintah dalam memajukan peternak sapi di Jawa Barat belum bisa menerapkan secara maksimal. Dimana sosialisasi sama sekali tidak dilakukan.

Kajian ditingkat operasional. Peternak sapi dilingkungan KPSBU pada umumnya tidak mengakses KUPS. Kendala yang umum adalah kurangnya sosialisasi dari Pemerintah ataupun dari pihak bank penyelenggara.

BAB I. PENDAHULUAN

Rencana pemerintah memenuhi kebutuhan pasokan sapi dalam negeri mengalami banyak hambatan dan rintangan. Ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* akan pasokan daging sapi membuat harga daging sapi dipasaran mengalami tekanan kenaikan yang cukup tinggi. Tabel 1 menunjukkan statistik aktivitas produksi sapi potong dan sapi perah di Jawa Barat dan nasional. Tampak bahwa industri peternakan sapi mengalami pertumbuhan yang tidak signifikan, dibandingkan dengan peningkatan pertumbuhan penduduk.

Jawa Barat sebagai salah satu sentra penghasil sapi potong dan perah ternyata masih menunjukkan kontribusi kenaikan relatif kecil dari tahun ke tahun sebagai penyedia sapi potong. Sedangkan dari sisi sapi perah, Jabar berkontribusi sekitar 24% terhadap total produksi sapi perah nasional, hampir memenuhi seperempat kebutuhan nasional. Seperti halnya sektor pertanian lainnya, agribisnis yang berbasis pada peternakan mengalami fenomena yang sama ketika basis lahan menjadi terbatas. Pentingnya mengatur *value chain* atau rantai nilai pasok mendesak untuk dilakukan.

Tabel 1. Produksi Sapi Potong dan Sapi Perah (Jabar dan Nasional)

| SAPI POTONG | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| JABAR | 295.554 | 309.609 | 327.750 | 432.989 | 441.350 |
| TOTAL | 12.256.604 | 12.759.838 | 13.581.571 | 14.824.373 | 16.034.337 |
| % kontribusi | 0.024 | 0.016 | 0.024 | 0.029 | 0.028 |

| SAPI PERAH | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| JABAR | 111.250 | 117.337 | 120.475 | 139.970 | 147.958 |
| TOTAL | 457.577 | 474.701 | 488.448 | 597.213 | 621.980 |
| % kontribusi | 0.243 | 0.247 | 0.247 | 0.234 | 0.238 |

Sumber : BPS, 2012

Revitalisasi peternakan dilakukan pemerintah lewat penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No 40/Permentan/PD.400/9/2009 mengenai pedoman pelaksanaan kredit usaha pembibitan sapi atau yang dikenal dengan istilah KUPS. Peraturan ini sejalan

dengan misi pemerintah dalam rangka pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UKM. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UKM mencakup:

- a) Peningkatan akses pada sumber pembiayaan,
- b) Pengembangan kewirausahaan,
- c) Peningkatan pasar produk UKM, dan
- d) Reformasi regulasi UKM

Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UKM, misalnya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit usaha pembibitan sapi (KUPS), serta skema pembiayaan lainnya.

Namun *Tempo.co* pada edisi 15 April 2013 menuliskan bahwa *Pemerintah Gagal Menambah Populasi Sapi*. Indikasinya adalah bahwa sampai dengan Februari 2013 total sapi yang ada dari program KUPS ini hanya mencapai 40,8 ribu ekor. Program KUPS sendiri menargetkan penambahan 1 juta ekor sapi sampai dengan tahun 2014, yaitu sekira 200 ribu ekor sapi pertahun dari tahun 2009 sampai dengan 2014. Hal ini tampak bahwa realisasi KUPS yang rendah, yaitu hanya mencapai Rp.509,1 milyar sejak 2010 sampai dengan 2013. Sedangkan komitmen pinjaman yang akan disalurkan oleh ke 11 bank pelaksana tersebut adalah sebesar Rp. 3,96 triliun.

Pada artikel lainnya *Tempo.co* pada edisi 15 April 2013, juga menyampaikan bahwa *Peternak Menderita Kredit Macet Pembibitan Sapi*. Analisis dan fakta dilapangan menunjukkan bahwa implementasi KUPS mengindikasikan kegagalan. Faktor penyebab kegagalan belum dieksplorasi secara seksama, namun tampak faktor koordinasi antar aktor dan kinerja peternak dapat menjadi pembuka tabir kegagalan tersebut. Para pakar peternakan menyebutkan bahwa para peternak sapi lebih memilih bergelut di bidang penggemukan. Dikarenakan keuntungan bisnis di bidang pembibitan sangat kecil, butuh modal besar bahkan cenderung merugi. Hal ini mendorong banyak peternak rakyat memilih melakukan penggemukan dibandingkan pembibitan sapi. Pembibitan sapi dilakukan dengan tujuan untuk tabungan masa depan yaitu anak sekolah atau keperluan lain, bukan untuk kepentingan bisnis. Menunjukkan bahwa,

pelaksanaan penyaluran KUPS memang belum sesuai yang diharapkan. Masih banyak sekali terjadi penyimpangan di lapangan.

Selain itu, adanya dugaan (1) kelambanan pemerintah melakukan *integrated farming / meat value chain* (2), prinsip "kemudahan" dan "kecepatan" penyaluran KUPS turut berkontribusi gagalnya pencapaian tujuan dari pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian No 40/Permentan/PD.400/9/2009. Sebagai catatan, *cow integrated farming* yang harus dipersiapkan pemerintah mencakup perkebunan, pengolahan pakan, pembibitan sapi, penggemukan sapi, pengolahan sapi dan perdagangan sapi (*meat value chain*).

Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap mengenai dampak KUPS terhadap kinerja peternak sapi. Untuk itu dilakukan tahap eksplorasi penyaluran dan penggunaan KUPS. Penyaluran KUPS akan menyangkut mekanisme dan prosedurnya, sedangkan penggunaan KUPS menyangkut aspek manfaat terhadap pengembangan usahanya.

Identifikasi masalah

1. Bagaimanakah efektivitas penyaluran dana KUPS bagi peternak Sapi di Lembang?
2. Eksplorasi kriteria/faktor keberhasilan/kegagalan dari pelaku usaha;
3. Deskripsi peran KUPS terhadap kinerja dan pengembangan usahanya.

Keutamaan penelitian

Beberapa keluaran yang akan dihasilkan melalui penelitian ini berupa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan KUPS saat ini dengan kasus untuk peternak sapi di Lembang. Hasil evaluasi ini berupa mekanisme dan prosedur, serta aspek manfaatnya terhadap pengembangan dan kinerja usaha. Keluaran ini bermanfaat bagi pengambil keputusan tentang kelanjutan dan pengembangan dari program KUPS.

Sedangkan keluaran lain adalah sebuah kajian ilmiah mengenai dampak KUPS terhadap kinerja dan pengembangan usaha, serta model keberhasilan/kegagalan KUPS berdasarkan kinerja usahanya.

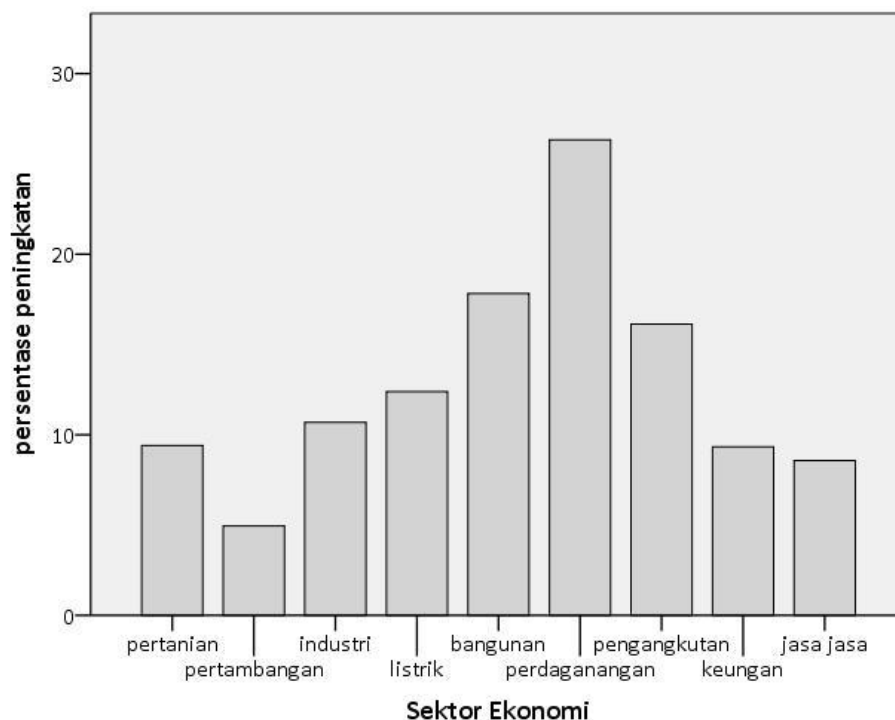
Target keluaran

Keluaran yang ditargetkan untuk dihasilkan

1. Evaluasi kebijakan KUPS terhadap usaha peternakan sapi;
2. Artikel ilmiah pada seminar nasional/internasional;

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Agribisnis peternakan (sapi) merupakan salah satu komoditas yang menjadi perhatian pemerintah. Kebutuhan masyarakat akan protein hewani dari sapi (daging) sudah menjadi bagian menu makan keseharian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu melakukan pengaturan *supply* atau pasokan daging sapi di pasar. Keterlibatan pemerintah tidak sebatas pada pasokan, tetapi juga dimulai dari proses pembibitan, penggemukan sampai dengan pejualan.



Gambar 1. Persentase perkembangan investasi 2007-2008 untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dari beberapa sektor (BPS, 2008).

Di Indonesia dapat dikatakan dengan jumlahnya yang banyak dan bergerak di hampir semua sektor membuat UKM diperhitungkan sebagai penyumbang bagi kesempatan kerja dan pendapatan khususnya di lapisan keluarga berpendapatan rendah selain juga menjadi penggerak bagi ekonomi lokal. BPS (2008) menyajikan laporan perkembangan investasi untuk usaha mikro, kecil dan menengah dari beberapa sektor (Gambar 1). Dalam gambar 1. tersebut tampak bahwa perkembangan untuk sektor industri pengolahan cukup tinggi setelah sektor perdagangan, bangunan, dan pengangkutan.

Di banyak tempat terlihat juga kecenderungan UKM seperti di negara-negara NICs yaitu menjadi pelaku bisnis yang melakukan sub kontrak terhadap usaha-usaha besar.

Seperti yang terjadi di Cikampek, Tangerang, Bandung dan lainnya. Selama krisis ekonomi dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja di Usaha Menengah menunjukkan lebih baik daripada Usaha Kecil (Tambunan, 2000). Ini misalnya terjadi di beberapa sektor industri seperti pertanian, pertambangan dan listrik, gas dan air bersih, sedangkan di Usaha Kecil tampak penurunan seperti di keuangan dan konstruksi. Meskipun demikian kontribusi terbesar Usaha Kecil adalah dari sektor pertanian bukan dari sektor manufaktur seperti di negara-negara NICs. Pada tahun 2000 tercatat sumbangannya terhadap PDB adalah sebesar 40,0% (Tambunan, 2002). Namun perlu juga dipahami bahwa dalam hal UKM terdapat berbagai masalah yang belum menampakkan pemecahannya secara signifikan. Seperti keterbatasan modal kerja maupun untuk investasi, kesulitan pemasaran, kesulitan mendapat bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga yang murah, keterbatasan teknologi dan kemampuan sumber daya manusianya.

Value Chain dan Actor Analysis

Porter (1985) memperkenalkan konsep “value chains” dan didukung oleh Keyser (2006) sebagai sebuah bentuk “partnerships”, “alliance” and “collaboration” antar aktor yang terkait dengan tujuan peningkatan pangsa pasar atau kepuasan konsumen. Di dalam kerjasama tersebut, setiap aktor akan memberikan kontribusi sesuai peran masing-masing, selain juga melakukan “*sharing knowledge* dan informasi” dalam rangka peningkatan kualitas mutu produk yang dihasilkan (Aramyan dan Kuiper, 2009, Hoekstra, 2006, dan GTZ, 2008).

Oleh karena itu kinerja rantai pasok terutama untuk sektor agribisnis peternakan (dalam hal ini adalah sapi potong dan perah) sangat berhubungan dengan struktur dan strategi dari setiap peran aktor. Artinya, analisa kinerja rantai pasok sapi dari mulai breeding sampai growing (tahap pembibitan sampai penggemukan), termasuk didalamnya informasi dan manajemen serta pengendalian pasokan sapi menjadi sangat penting untuk dikaji lebih jauh (Taylor, 2005; Taylor and Fearne, 2009).

Kwon and Suh (2005) menyebutkan bahwa untuk melakukan investigasi keterkaitan atau hubungan antar aktor di dalam rantai pasok sapi, penggunaan *agency theory* menjadi salah satu kerangka teori yang mampu memberikan (1) pemahaman yang lebih detail dalam kerangka analisa *multi-actor supply chain operation*; (2) memahami hubungan dalam konteks “social and value relationship” antar aktor terkait seperti rasa percaya (trust), komitmen (commitment) dan adaptasi terhadap “sesuatu” yang mereka percaya akan berdampak pada hasil (outcome).

Agency theory adalah sebuah teori yang cukup penting dilakukan di sektor agribisnis. Teori ini sudah dipergunakan di studi bidang ekonomi (Jack and Kholeif, 2007; Laffont and Martimort, 2001) dan organisasi (Eisenhardt, 1999). Laffont and Martimort (2007) mempergunakan teori ini untuk menjelaskan “conflicting objectives (incentives theory) of the organization members”. Pelaksanaan KUPS kepada organisasi petani sangat dimungkinkan mengadopsi *agency theory* untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kredit tersebut.

Salah satu aktor yang terlibat dalam rantai pasok sapi seperti dijelaskan di atas adalah institusi. North (1998) dan Prasad (2003) mendefinisikan institusi sebagai berikut :

“ the Institutions are the humanly devised constraint that is structure political, economic and social interaction”. Thus Institutions can be seen as rules of behavior based on various important foundations, from culture and mental models to legislation and from social norms to political structures (Selznick, 1957).

Hoffman (1999) didukung oleh Powell dan DiMaggio (1991) juga menyatakan bahwa

“institutional theory can be used to answer all questions related to the role of institutional influence on social choices (how social choices are shaped); how they behave, mediated and channeled by the institution environment and acting to the environmental pressure”.

Pemahaman ini sangat relevan dalam studi analisa implementasi KUPS.

Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang disebut juga sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan sebagainya yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Secara ringkas Konvensi ILO169 tahun 1989 memberi definisi ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah mereka secara turun temurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi

sub sistem antara lain pertanian tradisional seperti perburuan, perkebunan, mencari ikan, dan lainnya kegiatan disekitar lingkungan alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan. Seluruh kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat, artinya hanya ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya sendiri. Kegiatan ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri dan masyarakatnya, sehingga tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep, ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah cara untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk lebih memajukan dan mensejahterakan masyarakat melalui pembentukan program-program yang bermanfaat untuk menanggulangi kemiskinan di negara ini. Program-program yang dibentuk itu antara lain dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), membentuk kegiatan-kegiatan seperti PNPM, Program Inpres Desa Tertinggal (PIDT) yang melakukan pengembangan sumberdaya manusia, modal, dan usaha produktif serta pengembangan kelembagaan masyarakat di desa-desa tertinggal, PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum, P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil) yang dilaksanakan Departemen Pertanian, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral.

Program-program yang dilaksanakan tersebut ada yang berhasil ada juga yang tidak. Tetapi sebagian besar program itu dapat membantu untuk mensejahterakan keadaan masyarakat di negara ini. Maka dari itu setelah melalui berbagai pertimbangan maka pemerintah mengeluarkan program baru yaitu salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soewarno yang menyatakan bahwa efektivitas adalah penguKURan dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Caster I. Bernard, efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama (Bernard, 1992:207). Menurut Effendy (1989) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan" (Effendy, 1989:14) sedangkan Menurut Susanto, "Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi" (Susanto, 1975:156).

Menurut Campbel J.P, penguKURan efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output

Dengan demikian efektivitas bisa diartikan sebagai suatu penguKURan akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektivitas (effectiveness) yang didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran atau strategi. Menurut Ensiklopedia administrasi, (The Liang Gie, 1967) menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut : Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

Dari semua penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki, artinya,

pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Jadi dimaksudkan disini yaitu bagaimana penyaluran dana KUR pada BRI itu mencapai titik berhasil sesuai dengan teori-teori yang ada tersebut. Untuk mengetahui apakah penyaluran dana KUR tersebut efektif atau tidak maka dibutuhkan indikator atau alat ukur. Alat ukur yang digunakan disini untuk mengetahui apakah penyaluran dana Kredit Usaha Peternak Sapi (KUR) itu berhasil ataupun tidak adalah dengan melihat apakah tujuan dari dibentuknya program Kredit Usaha Peternak Sapi (KUR) ini sudah tercapai dan apakah memberi manfaat bagi masyarakat khususnya para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM).

Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)

Kredit berasal dari kata *cedere* yang berarti maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali. Pengertian “kredit” menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Untuk mencapai target swasembada daging sapi pada tahun 2014, pemerintah membuat beberapa kebijakan yaitu pembatasan impor daging beku dan sapi bakalan, penyelamatan sapi betina produktif, dan penambahan populasi sapi. Kebijakan pembatasan impor daging beku dan sapi bakalan dilakukan melalui sistem kuota impor. Kebijakan penyelamatan sapi betina produktif dilaksanakan berupa pemberian insentif kepada peternak yang memelihara sapi betina. Sedangkan penambahan populasi sapi dicapai melalui dorongan kepada peternak, kelompok peternak, dan perusahaan untuk

membentuk bisnis pembibitan sapi. Dorongan tersebut berupa penyaluran kredit usaha dengan bunga yang disubsidi oleh pemerintah, sehingga besar bunga pinjaman dipatok sebesar 5%. Inilah yang dikenal sebagai kredit usaha pembibitan sapi – KUPS. Besaran bunga yang harus ditanggung oleh pemerintah sendiri adalah 6.5 %.

Implementasi KUPS ini didasarkan pada 2 peraturan menteri yaitu PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 40/Permentan/PD.400/9/2009, tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI, yang diterbitkan pada tanggal 18 September 2009. Serta Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.05/2009, tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi, yang berlaku mulai 18 Agustus 2009.

Sebagai langkah implementasi kedua peraturan menteri ini, ditunju sebanyak 11 bank pemerintah sebagai pelaksana, yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BPD Sumut, Bank BPD Sumbar, Bank BPD Jateng, Bank BPD DIY, Bank BPD Jatim, Bank BPD Bali, dan Bank BPD NTB.

Transaksi kredit dapat terjadi atau timbul karena ada suatu pihak yang meminjam uang atau barang kepada pihak yang lainnya yang dapat menimbulkan tagihan bagi kreditur. Hal lain yang dapat menimbulkan transaksi kredit adalah kegiatan jual beli dimana pembayarannya akan ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu baik sebagian ataupun seluruhnya. Aktivitas kredit diatas secara teknis akan mendatangkan piutang bagi kreditur dan mendatangkan utang bagi debitur.

Pada umumnya, kredit merupakan program kerja dari sebuah bank yang kegiatannya adalah meminjamkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan baik itu nasabah mereka ataupun tidak dengan menggunakan berbagai jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengertian kredit menurut undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah : penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Program pemberian kredit yang banyak dilakukan oleh bank-bank memiliki tujuan yang hampir sama yaitu untuk memberi kesempatan kepada orang-orang atau masyarakat untuk membuka atau merintis pekerjaan sendiri yang berguna untuk memperbaiki keadaan

ekonomi mereka. Pemberian kredit ini terbagi atas pemberian kredit oleh Bank itu sendiri dan ada yang bekerjasama dengan Pemerintah.

Manfaat dari disalurkan dana KUPS adalah untuk memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya. Bagi para masyarakat yang memiliki usaha tetapi terkendala di bidang modal untuk dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya dapat mengajukan permohonan kredit dan mendapatkan pinjaman. Dengan begitu, usaha yang dimiliki oleh mereka akan dapat lebih maju dan berkembang baik itu dari segi produksi, pemasaran serta untung yang diperoleh kemudian.

BAB III. METODE PENELITIAN

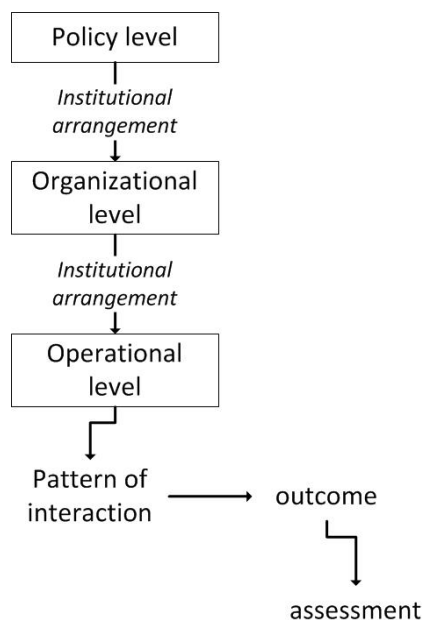
Jenis penelitian, populasi dan target populasi

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris yang bertujuan untuk melakukan investigasi faktor-faktor dalam mengukur kinerja KUPS kepada pelaku usaha peternakan sapi yang memperoleh subsidi bunga dari pemerintah.

Pelaku usaha peternakan sapi untuk selanjutnya disebut pelaku usaha yang meliputi usaha pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan peternak yang melakukan usaha pembibitan sapi. Populasi penelitian ini adalah peternak yang tergabung pada koperasi peternak sapi di Lembang dan menerima KUPS. Sample penelitian ini adalah peternak di daerah Lembang.

Kerangka konseptual

Evaluasi terhadap kebijakan dapat dilakukan melalui pendekatan Bromley, yang melihat pada tiga jenjang yaitu pada tingkat kebijakan (*policy level*), tingkat organisasi (*organizational level*), dan tingkat operasionalisasi (*operational level*). Gambar 1 berikut menggambarkan kerangka konseptual prose evaluasi kebijakan, sedangkan Tabel 1 menunjukkan kerangka observasi untuk evaluasi kebijakan.



Gambar 1. Kerangka konseptual

Gambar 2. Kerangka konseptual evaluasi kebijakan melalui pendekatan institusional

| Level | Agent/institutional | Role | Interaksi | Outcome | Assessment |
|-----------------------|------------------------|------|-----------|---------|------------|
| Policy | Kementerian/pemerintah | ... | | ... | ... |
| Organizational | pembibit | --- | --- | ... | ... |
| | Koperasi | --- | --- | | ... |
| | Perbankan | | | | |
| Operational | Peternak | ... | ... | ... | ... |
| | Buruh | | | | |

Selain aspek evaluasi kebijakan, penelitian ini memfokuskan juga pengukuran kinerja usaha peternakannya. Dalam memetakan kinerja pelaku usahanya diperlukan sejumlah indikator kinerja. Tambunan (2002) menyebutkan beberapa faktor keunggulan kompetitif yang harus dimiliki oleh setiap usaha untuk dapat bertahan diantaranya adalah penguasaan teknologi, keunggulan sumber daya manusia yang dimilikinya, tingkat efisiensi dan efektivitas, mutu produk yang dihasilkan, promosi, skala ekonomi yang rasional, jaringan bisnis dan modal serta sarana.

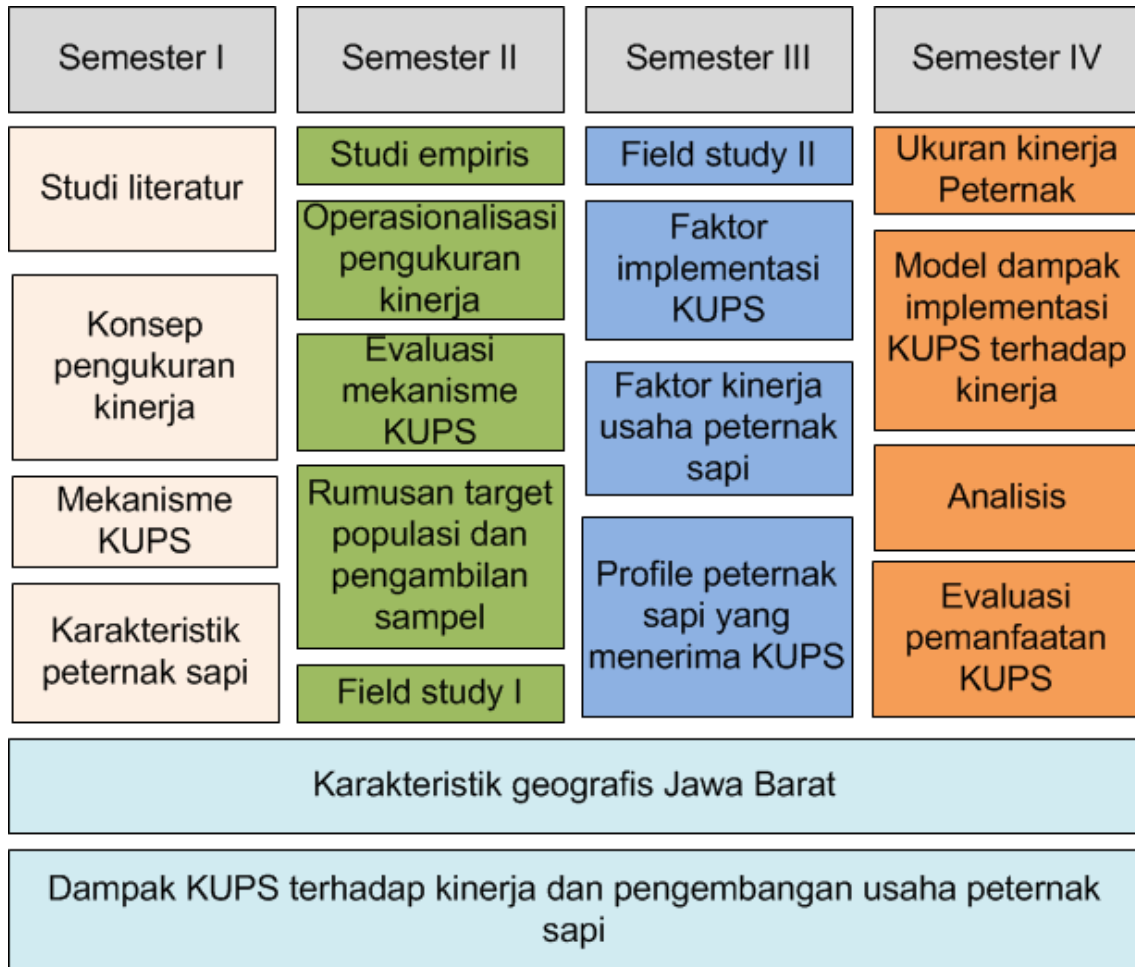
Road map penelitian

Dalam memetakan kinerja dari penyaluran KUPS kepada pelaku usaha peternakan sapi, maka tahap penelitian akan terbagi menjadi dua yaitu (1) tahap I : analisis deskriptif dan (2) tahap II : studi eksplanatori. Gambar 3 menampilkan *Road map* penelitian yang mendeskripsikan tahap penelitian tersebut.

Di tahap studi deskriptif, penelitian ditujukan untuk menggambarkan *existing condition* dari para penerima KUPS. Hasil dari studi deskriptif (temuan deskriptif) akan dipergunakan sebagai input bagi tahap II yaitu studi eksplanatori. Di tahapan ini, konsep, kategori dan proposisi akan dibangun untuk kemudian diverifikasi dan di analisa lebih detail. Hasil dari penelitian ini adalah kajian empiris efektivitas (mekanisme dan prosedur) kinerja penyaluran KUPS di Propinsi Jawa Barat.

Road map penelitian terdiri dari empat bagian utama yaitu studi literatur, studi empiris, field study, dan analisis, di tambah dengan 2 kajian yaitu mengenai karakteristik geografis Jawa Barat dan dampak KUPS terhadap kinerja dan pengembangan usaha peternak sapi. Studi literatur akan memfokuskan pada konsep pengukuran kinerja, mekanisme KUPS dan karakteristik peternak sapi di Jawa Barat. Studi empiris adalah langkah implementasi dari hasil studi literatur tersebut dalam mengukur kinerja, dan

tahap analisis merupakan integrasi 2 kajian tersebut dengan hasil penguKURan kinerja, evaluasi pemanfaatan KUPS, dan profile peternak sapi.



Gambar 3. Road map penelitian dampak implementasi KUPS terhadap kinerja usaha peternakan sapi di Jawa Barat.

Teknik pengambilan data

Sumber data dalam penelitian ini dapat berupa data sekunder maupun data primer. Untuk data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap pelaku peternakan sapi, ataupun instansi pemerintah yang terkait, seperti Pemda, lembaga keuangan (perbankan), Departement Pertanian. Sedangkan untuk data primer, pengambilan data akan dilakukan melalui survei. Adapun survei ini digunakan untuk mendapatkan pengukuran yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, faktor internal perusahaan, dan beberapa faktor eksternal yang relevan. Adapun target populasi adalah peternak sapi di Propinsi Jawa Barat. Metode sampel acak yang digunakan adalah pengambilan sampel

acak sederhana. Sebagai kerangka sampel adalah daftar yang dikeluarkan oleh koperasi peternak sapi Bandung. Berdasarkan daftar ini kemudian secara acak dipilih peternak.

Analisis data

Analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu preliminary survei, eksplorasi, dan konfirmasi. Tahap preliminary survei dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menggali sebanyak mungkin fakta-fakta yang berkaitan dengan KUPS, yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedurnya, faktor-faktor internal, faktor-faktor eksternal, dan konseptual pengukuran kinerja peternak. Hasil dari tahap ini adalah sebuah model teoritis yang menjelaskan hubungan antar faktor dalam menentukan perkembangan peternak. Serta seperangkat indikator yang menerangkan mengenai pengukuran kinerja peternak.

Tahap eksplorasi adalah dilakukan untuk mengenal dan mengelompokkan sekelompok indikator menjadi faktor. Teknik yang digunakan dalam tahap ini adalah dengan analisis faktor. Hasil dari tahap ini adalah seperangkat faktor yang tersusun dari sekelompok indikator-indikator yang tersusun dari tahap sebelumnya.

Tahap konfirmasi bertujuan untuk menguji secara statistika bahwa model yang telah disusun adalah sesuai dengan data empiris yang diperoleh. Tahap ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan antar faktor yang mempengaruhi kinerja peternak. Pada tahap ini dilakukan dengan beberapa teknik pengolahan data, yaitu

- 1) Analisis *latent class*, untuk menetapkan karakteristik peternak berdasarkan kategorisasi pemanfaatan KUPS;
- 2) Model keberhasilan/kegagalan usaha peternak berdasarkan tingkat pemanfaatan KUPS;

Cakupan

Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu saja dibatasi oleh cakupan geografis. Untuk itu diambil sebagai studi kasus adalah peternak sapi di Lembang.

Keutamaan penelitian

Penelitian ini akan memberikan pemahaman beberapa kondisi saat ini, yaitu bahwa

- Faktor faktor keberhasilan dan kegagalan implementasi KUPS di Lembang.

- Kajian kritis mengenai tingkat kinerja peternak sapi di Lembang.
- Evaluasi dampak implementasi KUPS terhadap kinerja usaha peternak sapi di Lembang.

Tahapan kerja

Tahapan kerja dan keluaran yang diharapkan dari setiap tahapan kerja adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Tahapan kerja semester pertama dan kedua.

| Semester | Kegiatan penelitian | Metode | Keluaran |
|----------|---|---|---|
| Pertama | Kajian empiris eksploratif i. Perumusan kinerja peternak berdasarkan pemanfaatan KUR ii. Pendalaman KUR berdasarkan mekanisme dan prosedurnya | Kualitatif dan survei Analisis data secara kualitatif dan eksplorasi | Indikator yang mendeskripsikan perumusan kinerja usaha berdasarkan pemanfaatan KUR. Evaluasi KUR berdasarkan mekanisme dan prosedur. |
| Kedua | Mendeskripsikan i. Kriteria dan faktor keberhasilan dan kegagalan peternak berdasarkan pemanfaatn KUR ii. Model kegagalan/keberhasilan peternak berdasarkan tingkat pemanfaatan KUR | Kuantatif dan survey Analisis kuantatif ukuran kinerja dan faktor internal | Kriteria dan faktor keberhasilan dan kegagalan. Deskripsi dampak KUPS terhadap kinerja dan pengembangan usaha peternakan sapi. |

BAB IV. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pengajuan kepada program LPPM mengenai judul diatas, dimana saat ini usaha pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional dan memajukan perekonomian Indonesia salah satunya adalah dengan memajukan UKM di seluruh daerah di Indonesia.

Program KUPS

Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan disemua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan, serta merupakan kehendak seluruh bangsa untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata, untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram, dan rasa keadilan bagi seluruh rakyat.

Pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata disemua lapisan masyarakat dan diseluruh wilayah tanah air, dimana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan serta dan menikmati hasilnya secara adil. Pembangunan ekonomi yang ditujukan pada pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan ditandai oleh mantapnya dasar demokrasi ekonomi yang menumbuhkan ekonomi rakyat.

Dari sisi ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah telah diakui sangat strategis dan penting tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk pembagian pendapatan yang merata. Karena peranannya yang sangat strategis dan penting, Indonesia memberikan perhatian khusus bagi perkembangan-perkembangan mereka, termasuk membina lingkungan dengan iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi dan memberikan akses pada sumberdaya produktif dan memperkuat kewirausahaan serta daya saingnya.

Revitalisasi peternakan dilakukan pemerintah lewat penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No 40/Permentan/PD.400/9/2009 mengenai pedoman pelaksanaan kredit usaha pembibitan sapi atau yang dikenal dengan istilah KUPS. Peraturan ini sejalan dengan misi pemerintah dalam rangka pemberdayaan Usaha Kecil Menengah

(UKM), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UKM. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UKM mencakup:

- a) Peningkatan akses pada sumber pembiayaan,
- b) Pengembangan kewirausahaan,
- c) Peningkatan pasar produk UKM, dan
- d) Reformasi regulasi UKM

Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UKM, misalnya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit usaha pembibitan sapi (KUPS), serta skema pembiayaan lainnya. Lewat dukungan keputusan Menteri Keuangan pada tahun yang sama yang menetapkan besarnya bunga pinjaman 5% untuk KUPS tersebut, sebagai langkah implementasinya telah ditunjukan juga sebanyak 11 bank pemerintah sebagai pelaksana, yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BPD Sumut, Bank BPD Sumbar, Bank BPD Jateng, Bank BPD DIY, Bank BPD Jatim, Bank BPD Bali, dan Bank BPD NTB.

KPSBU Lembang (Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara), adalah koperasi primer tunggal usaha di kecamatan Lembang yang merupakan suatu wadah bagi para petani peternak sapi perah dengan wilayah kerja Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) meliputi wilayah Desa Lembang, Wangunsari, Jayagiri, Cikidang, Cikhuripan, Pagerwangi, Sukajaya, Cilumber. Daerah Lembang yang berbukit-bukit ini memiliki ketinggian ± 1.200 meter dari permukaan laut, temperatur antara 17-25 °C dan curah hujannya sekitar 1.800 - 2.500 mm/tahun.

Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU)

Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU), terletak di kompleks pasar panorama Lembang dengan menempati lahan seluas 1.800 m², yang dibagi atas 400 m² untuk bagian produksi, 600 m² digunakan untuk produk pakan jadi atau makanan konsentrat, 400 m² digunakan untuk gudang bahan pollard dan dedak, 400 m² digunakan untuk perkantoran dan gudang kebutuhan pengurus dan anggota. Dengan jumlah anggota ± 8.000 orang peternak sapi.

Penelitian yang dilakukan hingga saat ini terdapat beberapa informasi yang telah didapat dari lapangan, adalah sebagai berikut:

- a) Adanya penurunan pasokan sapi dan penurunan kualitas susu di masyarakat saat ini khususnya di daerah Lembang dikarenakan harga bahan baku pakan ternak susu terus meningkat, ditambah musim kemarau yang berkepanjangan di awal tahun 2012, produksi susu sapi menurun sehingga pendapatan peternak umumnya turun. produksi susu terus turun bahkan produksi terendah sampai 98.500 liter/hari dan rata-rata produksi tahun 2011 119.006 liter/hari, padahal untuk anggaran tahun 2011 KPSBU dihitung pada rata-rata produksi 128.500 liter/hari. Maka berhadapan dengan kenaikan harga bahan baku yang luar biasa dan KPSBU tidak mungkin untuk memproduksi Mako satu jenis Rp.1.500/kg, karena dengan harga tersebut kandungannya tidak mendukung bagi sapi untuk berproduksi dengan baik, maka kita memutuskan untuk membuat dua jenis Mako yaitu Rp.1.500/kg dan Rp.2.000/kg.
- b) Kondisi di KPSBU Lembang pada tahun 2011, harga sapi jatuh padahal harga daging di pasaran tidak berubah, begitupun harga susu tidak beranjak walaupun harga susu import merangkak naik dan harga bahan baku pakan ternak terus naik ditambah musim kemarau di akhir tahun, produksi susu sapi menurun sehingga pendapatan peternak umumnya turun. Pemerintah juga terus menurunkan suku bunga untuk menggerakkan sektor riil, di akhir tahun 2011 SBI (Suku Bunga Indonesia) 6% dan pada bulan Februari 2012 turun lagi jadi 5,75%, dengan adanya penurunan tersebut tetap belum ada tanda-tanda sektor riil seperti peternakan bergairah. Kemudahan untuk mengambil kredit program KKPE, KUR, KUPS dimanfaatkan oleh para anggota. Namun pihak bank masih terpaku pada persyaratan yang bankable sehingga menyulitkan bagi para peternak untuk mengajukan kredit.

Kendala yang dihadapi KPSBU

Adan beberapa kendala yang dihadapi oleh KPSBU Lembang dan juga para anggotanya yang membutuhkan perhatian khusus dari seluruh pemangku kepentingan:

- a) Penurunan Genetika. Populasi Sapi perah bangsa Holstein di Indonesia ada sekitar 376.000 ekor yang rata-rata secara nasional memproduksi susu segar sejumlah 10-12 kg per ekor per hari sapi laktasi. Sementara itu, bibit sapi perah yang unggul sangat terbatas disamping harganya mahal, hal ini dapat berdampak pada penurunan produksi dan produktivitas sapi perah rakyat. Sedangkan ketersediaan bibit sapi perah lokal belum dapat memenuhi kebutuhan baik secara kualitas maupun kuantitas, peternak anggota koperasi belum dapat diandalkan untuk dapat menyediakan bibit sapi perah bermutu, dimana ini terjadi di Jawa Barat. Persediaan bibit saat ini mengandalkan dari straw BBIB Singosari dan BIB Lembang, sehingga dikhawatirkan terjadinya inbreeding akibat penggunaan straw yang sama secara terus menerus, untuk itu perlu adanya terobosan-terobosan bersama dalam rangka menyediakan bibit unggul baik melalui import straw elite bull atau pengadaan pejantan unggul dari luar yang lebih bervariasi.
- b) Harga bahan baku konsentrat naik setiap saat dan supplynya terbatas. Dengan dicabutnya BANPRES tentang distribusi Wheat Pollard, pengadaan bahan baku pakan konsentrat mengalami kesulitan baik dari sisi supply maupun harga yang tidak terjangkau oleh peternak/koperasi.
- Saat ini peternak harus menanggung 60% biaya produksi hanya untuk memenuhi pakan ternak saja, tanpa ada insentif pakan ternak dari pemerintah sebagaimana yang didapatkan oleh peternak di negara-negara lain. Stimulan dalam bentuk subsidi ini, meski sekecil apapun akan berpengaruh besar terhadap daya saing peternak sapi perah karena dengan pakan ternak yang kualitasnya tinggi akan dihasilkan susu dengan kualitasnya tinggi pula
- c) Kualitas dan Kuantitas susu turun. Terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas susu dikoperasi/KUD susu anggota banyak disebabkan banyak faktor diantaranya yaitu: sejumlah 80% sapi induk menderita mastitis subklinis yang diyakini mengurangi produktivitas paling tidak hingga 10%. Untuk pengendalian mastitis pada sapi perah memerlukan penyelesaian secara terintegratif dan berskala luas (lintas disiplin, melibatkan berbagai kepentingan), sehingga dalam pendekatannya memerlukan suatu gerakan nasional “kendalikan mastitis”, yang didukung oleh

banyak pihak, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, industri/swasta, asosiasi, koperasi, penyuluh dan peternak.

- d) Para anggota yang mengajukan KUPS kepada bank yang telah ditunjuk belum optimal, masih banyaknya para anggota yang tidak disosialisasikan mengenai produk tersebut, dimana apabila program tersebut jalan maka masalah-masalah tersebut diatas dapat diminimalisasikan.

Kajian Tingkat Kebijakan

Dalam rangka pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan protein hewani maka perlu didukung dengan ketersediaan jumlah ternak sapi yang cukup. Untuk mencapai populasi sapi yang mencukupi untuk target pencapaian swasembada daging maka perlu adanya kecukupan benih dan bibit sapi dalam kualitas dan kuantitas.

Kenyataan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa impor sapi, daging dan susu cukup tinggi, karena pasokan dari dalam negeri untuk kebutuhan konsumsi baru mencapai sekitar 60% dan pasokan susu dalam negeri baru mampu menyediakan 20%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya populasi sapi potong dan sapi perah yang tersedia sebagai bibit.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2009 bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pengembangan usaha perbenihan dan atau perbibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan benih dan bibit bersertifikat dan membina pembentukan wilayah sumber bibit.

Program pengembangan perbibitan merupakan suatu hal yang harus segera ditangani oleh pemerintah dalam mendukung program PSDSK. Program reguler untuk mendukung PSDSK tahun 2014 melalui pengembangan usaha pembibitan yang telah difasilitasi oleh pemerintah antara lain program skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Aksi Perbibitan dan APBNP. Hal ini bertujuan untuk menjadikan kelompok peternak mandiri serta dapat memanfaatkan sumber pendanaan dan pelayanan dalam upaya peningkatan skala usaha, pengetahuan dan keterampilan teknologi pembibitan.

Merujuk pada kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tanggal 18 Agustus 2009, terdapat beberapa Definisi dan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi :

1. Usaha Pembibitan Sapi adalah suatu kegiatan usaha yang menghasilkan bibit ternak sapi secara berkelanjutan.
2. Kredit Usaha Pembibitan Sapi, untuk selanjutnya disingkat KUPS, adalah kredit yang diberikan bank pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah.
3. Pelaku Usaha Pembibitan Sapi untuk selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak yang melakukan usaha pembibitan sapi.
4. Calon Peserta adalah Pelaku Usaha yang termasuk dalam daftar yang diusulkan memperoleh KUPS yang direkomendasikan oleh instansi yang membidangi fungsi peternakan dan atau Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota dan atau Direktorat Jenderal Peternakan.
5. Peserta adalah Calon Peserta yang ditetapkan oleh bank pelaksana sebagai penerima KUPS.
6. Perusahaan pembibitan adalah perusahaan peternakan yang bergerak dibidang pembibitan sapi.
7. Koperasi adalah koperasi primer sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang bergerak di bidang pembibitan sapi dan anggotanya terdaftar sebagai Calon Peserta/Peserta KUPS.
8. Kelompok/Gabungan Kelompok Peternak Pembibitan adalah kumpulan peternak pembibitan sapi yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, dan kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
9. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga KUPS yang berlaku dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Peserta.
10. Rencana Definitif Kebutuhan Usaha Pembibitan Sapi yang selanjutnya disebut RDK-UPS adalah rencana kebutuhan kredit bagi pelaku usaha yang disusun berdasarkan skala usaha pembibitan sapi dalam satu periode tertentu yang dilengkapi dengan jadwal pencairan dan pengembalian kredit.

11. Kebutuhan indikatif adalah biaya maksimum untuk setiap satuan unit usaha pembibitan sapi sesuai dengan skala usaha yang didanai KUPS dalam satu periode yang telah ditetapkan.
12. Kemitraan adalah kerjasama usaha pembibitan sapi antara perusahaan/koperasi dan kelompok/gabungan kelompok peternak yang saling menguntungkan.
13. Prosedur baku adalah tata cara pembibitan sapi yang baik sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik (Good Breeding Practices) atau Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik (Good Breeding Practices).
14. Bank Pelaksana adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang berkewajiban menyediakan, menyalurkan, dan menatausahakan KUPS.
15. Dinas adalah instansi yang membidangi fungsi peternakan dan atau kesehatan hewan.

Kajian Tingkat Organisasi : KPSBU Lembang

Profil KPSBU dan RAT

KPSBU Lembang (Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara), adalah koperasi primer tunggal usaha di kecamatan Lembang yang merupakan suatu wadah bagi para petani peternak sapi perah dengan wilayah kerja Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) meliputi wilayah Desa Lembang, Wangunsari, Jayagiri, Cikidang, Cikahuripan, Pagerwangi, Sukajaya, Cilumber. Daerah Lembang yang berbukit-bukit ini memiliki ketinggian ± 1.200 meter dari permukaan laut, temperatur antara 17-25 °C dan curah hujannya sekitar 1.800 - 2.500 mm/tahun.

Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU), terletak di kompleks pasar panorama Lembang dengan menempati lahan seluas 1.800 m², yang dibagi atas 400 m² untuk bagian produksi, 600 m² digunakan untuk produk pakan jadi atau makanan

konsentrat, 400 m² digunakan untuk gudang bahan pollard dan dedak, 400 m² digunakan untuk perkantoran dan gudang kebutuhan pengurus dan anggota.

KPSBU telah berdiri sejak 1971 dan terus berupaya mencapai tujuan menjadi model koperasi dalam menyejahterakan anggota. Keunggulan yang kami miliki adalah anggota yang setia dan aktif dalam menjalankan semua kewajibannya.

Pengurus mendorong tercapainya transparansi dan bertanggungjawab membangun manajemen koperasi yang berbasis pada hasil dan berorientasi pada kebutuhan anggota.

Manajemen diarahkan untuk berfungsi sebagai sebuah team agar dapat mendukung keberadaan koperasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif saat ini. Cost effective dan quality oriented merupakan kewajiban bagi Team Manajemen.

Tujuan utama KPSBU Jabar adalah menghasilkan Core Commodity yang unggul, yakni susu segar yang dihasilkan peternak sebagai produk bermutu tinggi di pasaran.

Visi

Menjadi koperasi susu terdepan di Indonesia dalam menyejahterakan Anggota

Misi

1. Menyejahterakan anggota melalui layanan prima dalam industri persusuan dengan manajemen yang berkomitment
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi melalui pendidikan, pemberdayaan SDM dan kemitraan strategis

Nilai-nilai

Nilai-Nilai KPSBU: Inovatif, Dinamis, Berorientasi Pada Kualitas Keterbukaan, Keadilan, Demokratis, Mandiri

Sejarah

1800's

- Sapi perah diperkenalkan oleh Bangsa Belanda
- 8 Agustus 1971, 35 peternak di Lembang mendirikan sebuah Koperasi Susu

1980

- Produksi : 2.840 Kg per hari
- Anggota : 319 orang

- Populasi Sapi perah : 800 ekor
- 1990
- Produksi : 41.891 Kg per hari
 - Anggota : 2.253 orang
 - Populasi Sapi perah : 7.026 ekor
- 2001
- Produksi : 86.366 Kg per hari
 - Anggota : 4.595 orang
 - Populasi Sapi perah : 12.085 ekor
 - Proyek HVA International – Frisian Flag Indonesia - KPSBU dibawah Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Belanda
 - Kemitraan CCA – KPSBU dalam Program INCODAP Extension
 - Slogan “Murni Koperasinya, Murni Susunya” diperkenalkan
 - Mendukung transparansi dan demokrasi melalui sistem one member one vote di Pemilihan Pengurus dan Pengawas
 - Amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi
 - MOU Penggunaan lahan perhutani untuk penanaman hijauan makanan ternak
- 2002
- Memulai penerapan harga susu berdasarkan kualitas, diberikan bonus dan denda
- 2004
- Pendidikan Dasar Koperasi Untuk Anggota yang wajib bagi seluruh anggota
 - Penyusunan dan penerapan Standard Operating Procedure manajemen
 - Penilaian Prestasi Kerja untuk staff
- 2005
- Perubahan Struktur Organisasi
 - Insentif manajerial melalui proses
 - Insentif manajerial melalui hasil
- 2006
- Produksi : 103.384 Kg per hari
 - Anggota : 6.092 orang
 - Populasi Sapi perah : 15.947 ekor

- Saat ini 80% susu yang dihasilkan oleh KPSBU hanya mengandung < 250.000 bakteri per mililiter
- Harga susu tertinggi pada level petenak adalah Rp. 3.000 (per Agustus 07)
- Mendapatkan Indonesia Cooperative Award dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM

2007

- Produksi : 102.885 Kg per hari
- Anggota : 6.226 orang
- Populasi Sapi perah : 16.533 ekor

2008

- Produksi : 110.144 Kg per hari
- Anggota : 6.351 orang
- Populasi Sapi perah : 16.469 ekor

2009 (s/d Juni 2009)

- Produksi : 119.492 Kg per hari
- Populasi Sapi perah : 16.469 ekor

Pengurus

Ketua : Drs. Dedi Setiadi SP
 Sekretaris : Drh. Ramdan Sobahi
 Bendahara : Toto Abidin

Pengawas

Ketua : Jajang Sumarno, BE
 Anggota : H.Asep Hamdani, ST
 : Mansyur Hamzah

Manajemen KPSBU Lembang

Untuk mendukung pelayanan yang efektif dan efisien, koperasi dipimpin oleh 1 Orang Manajer. Ada 255 staff yang melayani anggota agar dapat menghasilkan susu segar yang bermutu tinggi yang diterima oleh Industri Pengolahan Susu.

Kondisi di KPSBU Lembang pada tahun 2011, harga sapi jatuh padahal harga daging di pasaran tidak berubah, begitupun harga susu tidak beranjak walaupun harga susu import merangkak naik dan harga bahan baku pakan ternak terus naik ditambah

musim kemarau diakhir tahun, produksi susu sapi menurun sehingga pendapatan peternak umumnya turun.

Gambaran secara rinci yang terjadi di KPSBU adalah produksi susu terus turun bahkan produksi terendah sampai 98.500 liter/hari dan rata-rata produksi tahun 2011 119.006 liter/hari, padahal untuk anggaran tahun 2011 KPSBU dihitung pada rata-rata produksi 128.500 liter/hari. Mako berhadapan dengan kenaikan harga bahan baku yang luar biasa dan KPSBU tidak mungkin untuk memproduksi Mako satu jenis Rp.1.500/kg, karena dengan harga tersebut kandungannya tidak mendukung bagi sapi untuk berproduksi dengan baik, maka kita memutuskan untuk membuat dua jenis Mako yaitu Rp.1.500/kg dan Rp.2.000/kg.

Pemerintah juga terus menurunkan suku bunga untuk menggerakkan sektor riil, diakhir tahun 2011 SBI (Suku Bunga Indonesia) 6% dan pada bulan Februari 2012 turun lagi jadi 5,75%, dengan adanya penurunan tersebut tetap belum ada tanda-tanda sektor riil seperti peternakan bergairah. Kemudahan untuk mengambil kredit program KKPE, KUR, KUPS dimanfaatkan oleh pesaing KPSBU, di tahun 2011 para pengurus KPSBU Jabar menyaksikan saudara-saudaranya sesama peternak yang terlilit hutang ke bank, yang bermaksud untuk menambah penghasilan dengan meningkatkan skala usaha, pada akhirnya menjadi terbebani dengan hutang bank.

Pada tahun 2012 seluruh pengurus KPSBU Jabar dan para anggotanya berharap adanya perubahan yang berpihak kepada rakyat, yang dapat dilakukan oleh pemerintah khususnya dengan memberikan fasilitas melalui lembaga keuangan yang ditunjuk dengan tidak terlalu membebani para peternak baik dari segi administrasi maupun kemudahan akan pengaksesan.

Keanggotaan KPSBU per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Tahun 2012 keanggotaan KPSBU sebanyak 7.000 orang sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 6.969 orang sehingga ada peningkatan jumlah anggota sebanyak 31 orang.

Tanggapan atas KUPS

Sosialisasi dari pemerintah dan pihak bank yang ditunjuk mengenai KUPS: kapan?siapa?bgm?

Menurut pa Djadjang yang merupakan salah satu pengawas dari KPSBU Jabar menyebutkan bahwa program KUPS yang dibuat oleh pemerintah sebagai salah satu dukungan pemerintah dalam memajukan peternak sapi di Jawa Barat belum bisa

menerapkan secara maksimal. Dimana sosialisasi sama sekali tidak dilakukan, dan banyak para peternak yang salah paham terhadap fasilitas KUPS tersebut, karena pada saat pihak dari lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah (perbankan) dan pejabat setempat tidak menjelaskan secara detail kepada para peternak, sehingga mereka banyak menganggap bahwa dana yang akan mereka terima adalah merupakan dana hibah. Dari sinipun sudah terjadi kesalahan komunikasi/pengertian, sehingga menimbulkan banyaknya permasalahan kredit yang muncul di dunia perbankan, dan yang kemudian dirugikan adalah kedua pihak yaitu baik dari sisi perbankan maupun peternak. Hal tersebutlah yang membuat para peternak kemudian kecewa dan lebih memilih untuk meminjam ke koperasi.

Posisi KUPS dibandingkan fasilitas KPSBU itu sendiri

Dengan adanya subsidi pemerintah sebesar 6% untuk para peternak dengan fasilitas pinjaman baik itu KUPS, KUR, ataupun KKPE, tidak menjadi ancaman bagi KPSBU Jabar itu sendiri. Karena dari tingkat kemudahan dalam mengajukan pinjaman baik dari sisi kelengkapan pengadministrasian maupun lamanya proses pinjaman, koperasi lebih unggul. Dalam hal ini pihak bank tidak memberikan kemudahan sama sekali, dimana kelengkapan data haruslah bankable dan prosesnya pun relatif lama. Berbeda halnya dengan di koperasi dimana para anggota dimudahkan dalam proses pengajuan pinjaman hingga cairnya.

Fasilitasi KPSBU terhadap anggota yang akan mengakses KUPS

Menurut pa Dedi Setyadi selaku Ketua Umum KPSBU Jabar, pihak KPSBU tidak akan mempersulit para peternak dalam mengakses fasilitas pinjaman yang bersubsidi yaitu seperti KUPS, namun sangat disayangkan dimana pada tahun 2011, beliau menyaksikan saudara-saudara (para peternak) yang terlilit hutang ke bank, yang bermaksud untuk menambah penghasilan dengan meningkatkan skala usaha, pada akhirnya menjadi terbebani dengan hutang bank. Dan ditahun itupun beliau melihat banyak peternak ingin bergabung dengan KPSBU setelah merasakan ketidakpuasan dengan para pesaing KPSBU (seperti KUPS, KUR, KKPE).

Kajian Tingkat Operasional

Respon Peternak

Ada 6 orang peternak yang dipilih, untuk mendapatkan respon mengenai aspek operasional peternakan sapi, aspek KUPS, kendala dan manfaat, dan sosialisasi KUPS.

1. Nano Maryono (TPK Nagrak): usia 37 tahun
 - a) Kebutuhan akan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) agar dapat meningkatkan pendapatannya perbulan. Dengan dilakukan pembibitan sapi yang unggul sehingga menghasilkan kualitas susu yang baik, sehingga akan meningkatnya harga susu.
 - b) Kurangnya sosialisasi akan KUPS tersebut baik dari pemerintah maupun bank yang terkait.
 - c) Tidak adanya tim spesialis yang memberikan penyuluhan akan manfaat dari pengambilan fasilitas KUPS bagi para peternak
 - d) Tidak adanya informasi yang detail mengenai KUPS
 - e) Tidak disetujuinya pengajuan fasilitas KUPS dikarenakan datanya tidak bankable
2. Wawan Irawan (TPK Barunagri): usia 35 tahun
 - a) Kebutuhan akan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) agar dapat meningkatkan pendapatannya perbulan. Dengan dilakukan pembibitan sapi yang unggul sehingga menghasilkan kualitas susu yang baik, sehingga akan meningkatnya harga susu.
 - b) Kurangnya sosialisasi akan KUPS tersebut baik dari pemerintah maupun bank yang terkait.
 - c) Tidak adanya tim spesialis yang memberikan penyuluhan akan manfaat dari pengambilan fasilitas KUPS bagi para peternak
 - d) Tidak adanya informasi yang detail mengenai KUPS
 - e) Telah disetujuinya pengajuan fasilitas KUPS
 - f) Tidak adanya monitoring atau penyuluhan ulang terhadap fasilitas KUPS tersebut
3. Jajang (TPK Cilumber): usia 40 tahun
 - a) Kebutuhan akan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) agar dapat meningkatkan pendapatannya perbulan. Dengan dilakukan pembibitan sapi yang

- unggul sehingga menghasilkan kualitas susu yang baik, sehingga akan meningkatnya harga susu.
- b) Kurangnya sosialisasi akan KUPS tersebut baik dari pemerintah maupun bank yang terkait.
 - c) Tidak adanya tim spesialis yang memberikan penyuluhan akan manfaat dari pengambilan fasilitas KUPS bagi para peternak
 - d) Tidak adanya informasi yang detail mengenai KUPS
 - e) Tidak disetujuinya pengajuan fasilitas KUPS dikarenakan datanya tidak bankable
4. Odo (TPK Pamecelan): usia 45 tahun
- a) Kebutuhan akan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) agar dapat meningkatkan pendapatannya perbulan. Dengan dilakukan pembibitan sapi yang unggul sehingga menghasilkan kualitas susu yang baik, sehingga akan meningkatnya harga susu.
 - b) Kurangnya sosialisasi akan KUPS tersebut baik dari pemerintah maupun bank yang terkait.
 - c) Tidak adanya tim spesialis yang memberikan penyuluhan akan manfaat dari pengambilan fasilitas KUPS bagi para peternak
 - d) Tidak adanya informasi yang detail mengenai KUPS
 - e) Tidak disetujuinya pengajuan fasilitas KUPS dikarenakan datanya tidak bankable
5. Heri Sutisna (TPK Cikawari): usia 47 tahun
- a) Kebutuhan akan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) agar dapat meningkatkan pendapatannya perbulan. Dengan dilakukan pembibitan sapi yang unggul sehingga menghasilkan kualitas susu yang baik, sehingga akan meningkatnya harga susu.
 - b) Kurangnya sosialisasi akan KUPS tersebut baik dari pemerintah maupun bank yang terkait.
 - c) Tidak adanya tim spesialis yang memberikan penyuluhan akan manfaat dari pengambilan fasilitas KUPS bagi para peternak
 - d) Tidak adanya informasi yang detail mengenai KUPS
 - e) Telah disetujuinya pengajuan fasilitas KUPS

- f) Tidak adanya monitoring atau penyuluhan ulang terhadap fasilitas KUPS tersebut
6. Aep (TPK Cibedug): usia 38 tahun
- a) Kebutuhan akan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) agar dapat meningkatkan pendapatannya perbulan. Dengan dilakukan pembibitan sapi yang unggul sehingga menghasilkan kualitas susu yang baik, sehingga akan meningkatnya harga susu.
 - b) Kurangnya sosialisasi akan KUPS tersebut baik dari pemerintah maupun bank yang terkait.
 - c) Tidak adanya tim spesialis yang memberikan penyuluhan akan manfaat dari pengambilan fasilitas KUPS bagi para peternak
 - d) Tidak adanya informasi yang detail mengenai KUPS
 - e) Tidak disetujuinya pengajuan fasilitas KUPS dikarenakan datanya tidak bankable

Sosialisasi KUPS

Peran Pemerintah

Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Berbagai skim Kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, peternakan dan perkebunan. Peran pemerintah dalam skim-skim kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga skim kredit dimaksud, sementara dana kredit/pembiayaan seluruhnya (100%) berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu pemerintah berperan dalam penyiapan UMKM agar dapat dibiayai dengan skim dimaksud, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain.

| | |
|----------------------------|--|
| Definisi | KUPS adalah Kredit yang diberikan kepada bank pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi |
| Usaha yang Dibiayai | usaha pembibitan sapi untuk produksi sbibit sapi potong atau bibit sapi perah yang dilengkapi nomor identifikasi berupa microchips |
| Jangka Waktu Proyek | 2014 |
| Sumber Dana | Bank Pelaksana 100% |
| Plafon Kredit | Maksimal Rp 66.315.000.000,00 per pelaku usaha (perusahaan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak) |
| Suku Bunga Kredit | maksimal sebesar suku bunga penjaminan Bank (LPS) + 6% |
| Suku Bunga Petani/Peternak | maksimal 5% p.a. |
| Jangka Waktu Kredit | Paling lama 6 tahun, dengan masa tenggang 24 bulan |
| Peran Pemerintah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Keuangan : menetapkan Bank Pelaksana, melakukan kerjasama dengan Bank Pelaksana, menetapkan plafon per Bank, menyediakan dan membayar subsidi bunga, menilai kepatuhan penyaluran KUPS 2. Mentan, Menkeu, Gubernur, Bupati/ Walikota : pembinaan dan pengendalian pelaksanaan KUPS 3. Dinas Kab/Kota: memberikan rekomendasi perusahaan pembibitan, koperasi, kelompok/gab. kelompok sebagai peserta KUPS, mengetahui kontrak kemitraan, monitoring dan evaluasi, menyampaikan laporan kepada Dinas Prov. 4. Ditjen Peternakan : melakukan monitoring dan evaluasi |
| Target Realisasi | 200.000 ekor per tahun |
| Daerah Realisasi | Jatim, NTB, DIY, Jateng |
| Bank Pelaksana | BRI, BNI, Bank Bukopin, Bank Jatim, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Nagari, Bank Bali |
| Permasalahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan administrasi yang diminta perbankan untuk mengakses KUPS sangat rumit. 2. Pembayaran subsidi 6 bulan sekali memberatkan bagi Bank Pelaksana, sehingga ada usulan untuk pembayaran subsidi dilaksanakan 3 bulan sekali. |

Media

Melalui sosialisasi yang diadakan oleh pejabat terkait, pejabat setempat, namun tidak disetiap daerah yang kompeten, dan melalui media televisi, surat kabar.

Frekuensi

Untuk melalui media televisi dan radio dilakukan secara intensif pada saat permulaan fasilitas ini dibentuk, namun hal tersebut tidak secara simultan sehingga tidak adanya pengontrolan dan feedback dari sosialisasi atas program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Pawitan, G., Chandra, A. I., & Munthe, A. G. (2011). Pemetaan Kinerja Industri Manufaktur Kecil & Menengah Di Jawa Barat Pada Masa Berlakunya ACFTA *Laporan Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Nomor : 097/SP2H/PL/Dit.Litabmas/IV/2011, Tanggal 14 April 2011* (Vol. Laporan Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Nomor : 097/SP2H/PL/Dit.Litabmas/IV/2011, Tanggal 14 April 2011). Bandung: LPPM - Unpar.

Tambunan, T. (2000). The Performance of Small Enterprises during Economic Crisis: Evidence from Indonesia. *Journal of Small Business Management*(October 1).

Tambunan, T. (2002). Peranan UKM bagi Perekonomian Indonesia dan prospeknya. *Usahawan, XXXI*(07), hal. 3 & 7.

Tambunan, T. (2009). Women entrepreneurship in Asian developing countries: Their development and main constraints. *Journal of Development and Agricultural Economics, 1*(2), 27--40.

Peraturan Menteri Pertahuani No. 40/Permentan/PD.400/9/2009. Tentang Pedoman pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi.

Siaran Pers Departemen Keuangan Republik Indonesia, Biro Hubungan Masyarakat, No. 122/HMS/2009 Tanggl 31 Agustus 2009. Tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI. 2012. Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2012. Kementerian Pertanian RI.